

**PKI
dan
POLISI**

JAN KILIAN

PKI DAN POLISI

D.N. Aidit

*Menteri/Wakil Ketua MPRS/
Ketua CC PKI*



**Jajasan „Pembaruan”
Djakarta 1963**

D.N. Aidit

Sekedar Pengantar

Pada tahun² achir² ini Menteri/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI D.N. Aidit telah mengadakan tjeramah² didepan petugas² alat² negara a.l. didepan petugas² Kepolisian. Sedjak Mei 1962 D.N. Aidit telah memberikan tjeramah empat kali, jaitu pada tgl. 24 Mei 1962 dihadapan para Komandan Korps Polisi Security Kepolisian Komisariat Seluruh Indonesia, pada tgl. 18 September 1962 didepan para pengikut Kursus Persamaan Komisaris Polisi (Kursus B), pada tgl. 22 Februari 1962 dihadapan para mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan pada tgl. 6 Maret 1963 didepan Sekolah Kepolisian Sukabumi. Tiap tjeramah berlangsung lebihkurang 3 djam, dan pada tiap tjeramah diadakan tanjadjawab.

Dengan seizin Menteri/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI D.N. Aidit, maka tiga tjeramah jang terachir kami bukukan dengan djudul „PKI dan Polisi“, sedangkan tjeramah pertama karena pokok²nja diambilkan dari buku *Sosialisme Indonesia dan sjarat² pelaksanaannja* tidak kami sertakan dalam kumpulan tjeramah ini. Mudah²an usaha menerbitkan kumpulan tjeramah ini akan dapat memberikan sumbangan untuk menimbulkan

saling-mengerti diantara golongan² didalam masjarakat umumnja dan diantara kaum Komunis dengan pihak Kepolisian chususnja, sehingga dapat lebih memperkokoh persatuan „alle revolutionaire krachten" guna melaksanakan Pantja Program Front Nasional.

Mei 1963.

Penerbit

FUNGSI PARTAI DALAM PENJELESAIAN REVOLUSI INDONESIA

RETULING DIBIDANG KEPARTAIAN ADALAH
TJONTOH UNTUK BIDANG² LAIN

J. M. Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Sdr. R. Soekarno Djojonagoro meminta saja untuk mengadakan tjeramah tentang *Fungsi Partai Dalam Penjelesaian Revolusi Indonesia* dihadapan Kursus Persamaan Komisaris Polisi (Kursus B). Dengan segala senang hati dan dengan rasa terimakasih saja penuhi permintaan ini. Saja berterimakasih karena dengan ini saling-mengerti jang sudah ada antara fihak kepolisian dengan fihak kaum Komunis akan dipertinggi.

Ini bukanlah untuk pertama kali saja bertjeramah dihadapan polisi. Pada tanggal 24 Mei tahun ini saja djuga telah memberikan tjeramah dihadapan para Komandan Korps Polisi Security Kepolisian Komisariat Seluruh Indonesia. Pada waktu itu temanja *Sosialisme Indonesia dan Pantjasila*.

Dizaman kolonial dulu kaum kolonialis berusaha keras agar alat² negaranja, jang umumnja terdiri dari orang² Indonesia, tidak berpolitik atau buta politik, dan malahan supaja politik-phobi. Tudjuan ini mereka usahakan mentjapainja dengan ber-matjam² tjara, misalnja dengan mengadakan

antjaman² hukuman, suapan² atau dengan meninabobokkan. Hal ini dapat dimengerti, karena semuanya ini adalah untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan kolonial. Mereka kuatir kalau alat² negara berpolitik bisa politiknya bertentangan dengan kepentingan kolonial. Kekuatiran ini ber-alasan, karena alat² negara kolonial jang pada umumnya terdiri dari orang² Indonesia, mudah bangkit rasa kebangsaannya karena penindasan kolonial. Usaha subjektif kaum kolonialis itu ternyata tidak berhasil karena hukum objektif daripada kemadjuan lebih kuat daripada keinginan subjektif kaum kolonialis. Gerakan revolusioner telah menarik berdjuta-djuta Rakjat Indonesia kedalam kantjah politik, diantaranya terdapat djuga tidak sedikit orang² dari kalangan alat² negara kolonial.

Adalah satu kenjataan, bahwa sekarang masih ada orang jang mengandjurkan supaya alat² negara Republik kita buta politik, malahan mendorong supaya politik-phobi atau partai-phobi. Padahal, berkat perdjuaan politik dan perdjuaan partai²lah maka lahir negara Republik Indonesia, dengan segenap alat²nja. Tanpa Rakjat Indonesia berpolitik dan ber-partai² politik dimasa kolonial dulu tidak mungkin ada proklamasi 17 Agustus 1945 jang melahirkan Republik Indonesia. Masih adanya sekarang orang jang hidup dalam tawanan „politik-phobi” atau „partai-phobi” adalah sangat menjedihkan dan menundjukkan masih adanya keterbelakangan fikiran di kalangan bangsa kita.

Sedjak 17 Agustus 1945, dan lebih² lagi sesudah ada Manipol, „politik-phobi” dan „partai-phobi” adalah kedjahatan. *Manifesto Politik* (Manipol) itu sendiri sudah mengharuskan tiap warganegara berpolitik, dan Manipol mendjamin adanya partai² politik. Dalam Manipol djelas dikatakan bahwa : „..... tiap partai, organisasi dan perseorangan boleh mempunyai kejakinan politiknya sendiri, boleh mempunyai programnya sendiri, tetapi apa jang sudah ditetapkan sebagai Program Revolusi harus djuga mendiadi programnya dan harus ambil bagian dalam melaksanakan program tsb.” Per-undang²an kita mendjamin hak-hidup daripada partai (lihat Penpres 7/1959 dan Perpres 13/1960). Lebih daripada itu, dalam pidato „Djarek” dikatakan bahwa partai² jang sudah sah tidak hanya diberi hak-hidup, tetapi djuga „diberi hak bergerak, diberi hak perwakilan” (*Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi*, hal. 213).

Tidak dapat disangkal, bahwa retuling dalam alam kepartaian sudah berdjalan sebagaimana mestinja seperti jang dikatakan dalam „Djarek” (TBPI, hal. 213). Sajang sekali, bahwa didalam berbagai lembaga kenegaraan dan alat² negara retuling belum berdjalan sebaik dibidang kepartaian. Pada tempatnja dan sudah waktunya diserukan kepada jang belum mengadakan retuling sebagaimana mestinja, sebaiknya melaksanakan retuling dengan sungguh² daripada me-ngobar²kan „partai-phobi”. Retuling dibidang kepartaian telah berlangsung dengan radikal, telah berakibat lebih-

kurang 45 partai menjadi 10 partai, telah berakibat pembubaran Masjumi-PSI. Hendaknya retuling dibidang lain juga harus radikal seperti itu, berani mengadakan penggeseran² besar, pemertjatan², perombakan², penjingkiran² terhadap semua yang tidak betjus dan tidak Manipolis. Retuling dibidang kepartaian adalah tjontoh untuk bidang² lain.

Apakah partai itu? Partai atau partai politik adalah alat perdjjuangan daripada golongan² atau klas² didalam masjarakat untuk menjapai tjita² atau tudjuan politik kenegaraan. Sebab itu partai politik menghimpun atau mengorganisasi orang² yang paling sedar-politik dari golongan atau klas yang diwakili atau diperdjjuangkan tjita² politiknya oleh partai yang bersangkutan. Oleh karena itu pula watak dari sesuatu partai politik adalah sesuai dengan watak daripada golongan atau klas dalam masjarakat yang diwakilinja.

Di Indonesia, partai² politik sangat djelas menjadi alat perdjjuangan dari berbagai golongan dan klas dalam masjarakat untuk menjapai kemerdekaan nasional. Perbedaan watak dari partai² ini, yang menyebabkan perbedaan dalam tjara² perdjjuangannya adalah sesuai dengan watak daripada golongan atau klas yang diwakili oleh partai masing-masing.

Menurut Bung Karno, di Indonesia yang menjadi rochnja pergerakan Rakjat, yang menjadi rochnja partai² politik pada pokoknya terdiri dari tiga azas, jaitu Nasionalisme, Islamisme dan Marx-

isme (dalam tulisan „Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” — tahun 1926 — dalam *Dibawah Bendera Revolusi*).

Sedikit tjontoh tentang proses lahir dan perkembangan partai² politik dari ketiga aliran itu :

NASIONALISME : dimulai dengan Budi Utomo 1908, kemudian studiklub² kaum intelektual, Nationaal Indische Partij, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo).

ISLAMISME : dimulai dengan Serikat Dagang Islam (SDI — 1911), kemudian Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam (PSI) dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dll.

MARXISME (KOMUNISME) : dimulai dengan Serikatburuh² (SS-Bond-1905, VSTP-1908) Vaksentral², Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV-1914) dan Partai Komunis Indonesia (PKI-1920).

Djadi djelaslah bahwa gagasan Nasakom sudah mempunyai akar sedjarah 36 tahun (sedjak tulisan Bung Karno „Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” tahun 1926). Hanya orang yang anti kepada gerakan kemerdekaan Rakjat, atau orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti keadaan sosial-politis Indonesia yang menolak gagasan Nasakom atau yang me-ragu²kan akan kebenaran ilmiahnja.

Fungsi partai dalam gerakan revolusioner, dan dengan partai disini dimaksudkan partai revolusioner, antara lain ialah : pendidik dan pembimbing kesedaran politik massa Rakjat, penanam kesedar-

an berorganisasi dan berdisiplin dikalangan Rakjat. Semuanya ini sangat penting, karena untuk pekerdjaan² besar, seperti mengatur negara yang merdeka, tidak mungkin dilaksanakan tanpa tingkat tertentu dalam kesadaran politik, dalam kemampuan berorganisasi dan dalam disiplin daripada Rakjat. Tidak kalah pentingnja, ialah peranan partai² dalam *nation-building*, terutama dalam mengorganisasi Rakjat dalam organisasi yang bersifat nasional sehingga dengan demikian mendobrak batas² kesukuan.

Apa fungsi partai dalam penyelesaian Revolusi Indonesia? Tentu saja, yang dimaksudkan disini ialah fungsi partai revolusioner dalam penyelesaian revolusi Indonesia. Fungsinya dimasa lampau harus dilandjutkan, yaitu: pendidik dan pembimbing kesadaran politik massa Rakjat, penanam kesadaran berorganisasi dan berdisiplin dikalangan Rakjat, dan pembina nasyon (*nation-building*).

Tetapi tugas daripada partai² revolusioner sekarang sudah lebih luas daripada dulu. Dulu berjuang untuk kemerdekaan, sekarang mengkonsolidasi kemerdekaan yang sudah ditjapai. Setjara terperintji tugas² partai sudah dimuat dalam Manipol serta pedoman² pelaksanaannya (Djarek, Resopim, Membangun Dunia Kembali, Amanat Pembangunan Presiden, Tahun Kemenangan). Atau, dengan singkat ditjantumkan dalam tudjuan Front Nasional, yaitu: 1) *Menjelesaikan revolusi nasional Indonesia*; 2) *Membangun semesta untuk mentjapai masyarakat adil dan makmur*; 3) *Mengembali-*

kan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Walaupun soal Irian Barat sudah mendekati penyelesaian, tetapi demi pelaksanaan tudjuan menjelesaikan Revolusi Nasional dan pembangunan semesta, udjungtombak Revolusi Indonesia harus tetap pada sasarannya, yaitu kolonialisme dan imperialisme serta kakitangannya.

Singkatnja, fungsi partai dalam penyelesaian revolusi Indonesia a.l. ialah:

- A. Berdiri dibarisan depan dalam pekerdjaan mengindoktrinasikan gagasan² revolusioner seperti yang tertjantum dalam Manifesto Politik serta pedoman² pelaksanaannya untuk mentjiptakan kesatuan fikiran Rakjat mengenai tugas² revolusinya.
- B. Mengorganisasi massa Rakjat untuk memperkuat front nasional dan memperkuat disiplinnya.
- C. Mengorganisasi dan memimpin massa Rakjat untuk memperbaiki keadaan tingkat hidup dan tingkat kebudajaannya.

Untuk semuanya ini diperlukan kebebasan² demokratis yang luas.

(Ringkasan pidato dihadapan para pengikut Kursus Persamaan Komisaris Polisi (Kursus B), Sukabumi tanggal 18 September 1962).

DALAM ALAM MANIPOL KEPOLISIAN HARUS REVOLUSIONER

Pertama-tama saja mengutjapkan banjak terimakasih kepada Profesor Djokosutono SH jang telah meminta saja untuk mengadakan tjeramah malam ini, dan djuga banjak terimakasih kepada Sdr.² mahasiswa PTIK jang malam ini sudah siapsedia untuk mendengarkan tjeramah jang akan saja berikan.

Ini adalah pertama kali saja memberikan tjeramah dihadapan mahasiswa² PTIK, tetapi bukan untuk pertama kalinya memberikan tjeramah dihadapan kader² kepolisian. Dalam bulan Mei tahun jang lalu saja telah memberikan tjeramah dihadapan para Komandan Korps Polisi Security Kepolisian Komisariat Seluruh Indonesia di Sukabumi dengan tema *Sosialisme Indonesia dan Pantjasila*. Dalam bulan September tahun jang lalu saja djuga telah memberikan tjeramah dihadapan para pengikut Kursus Persamaan Komisaris Polisi (Kursus B), djuga di Sukabumi dengan tema *Fungsi Partai Dalam Penjelesaian Revolusi Indonesia*.

ADA DUA ASPEK DALAM KEKUASAAN POLITIK SEKARANG

Ada orang jang bingung mendengar bahwa Ketua Partai Komunis Indonesia memberi tjeramah

kepada kader² kepolisian. Mereka bingung karena mereka masih hidup dalam alam fikiran kolonial, alam fikiran bahwa Komunis dengan alat negara, chusunya Kepolisian, harus bermusuhan. Mereka sudah hidup dalam alam Indonesia merdeka, tetapi fikiran mereka masih belum merdeka, masih kolonial. Atau seperti jang sering dikatakan oleh Bung Karno, mereka adalah „orang² jang otak dan hatinja telah berdaki-berkarat tak dapat menjesuaikan diri dengan Manipol-Usdek". (*Tubapi*, halaman 211). Mereka adalah kaum Komunistophobi atau Nasakom-phobi jang oleh Bung Karno dalam pidatonya tanggal 13 Februari jbl., jaitu pidato dalam rapat pembukaan Sidang Bersama Pengurus Besar Front Nasional dan Pengurus Daerah Front Nasional, harus diganjang.

Saja tidak tahu apakah tjeramah² saja dihadapan para kader kepolisian mendapat sambutan baik atau tidak. Tentu saja penting bagi saja untuk mengetahui ini agar dapat memperbaiki tjeramah² saja, tetapi jang lebih penting lagi ialah fakta bahwa pemimpin Komunis diberi kesempatan memberikan tjeramah kepada kader² Kepolisian. Fakta ini mengungkapkan hal² penting, misalnja tentang watak kekuasaan politik dinegeri kita sekarang, jaitu bahwa dalam kekuasaan politik dinegeri kita sekarang tidak hanya ada kaum komprador, kapitalis birokrat dan tuantanah, tetapi djuga ada orang² jang pro-Rakjat jang disokong oleh kaum buruh, kaum tani, inteligensia revolusioner dan elemen² demokratis lainnja. Djadi, kekuasaan po-

litik dinegeri kita mempunyai dua aspek (segi), jaitu aspek *pro-Rakjat* dan aspek *anti-Rakjat*. Hal ini diperkuat lagi oleh fakta, bahwa Bung Karno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi/Perdana Menteri menjerukan supaya Rakjat membantu Bung Karno mengganjang mereka yang anti-Nasakom. Djadi, masih ada yang harus diganjang, dan mereka yang harus diganjang ini adalah elemen-elemen anti-Rakjat yang masih berperanan dalam kekuasaan politik sehingga sampai sekarang belum djuga terbentuk Kabinet Gotong Rojong yang berporos Nasakom.

Sikap fihak Kepolisian Negara yang tidak Nasakom-phobi dan tidak Komunisto-phobi sangat membantu kami kaum Komunis untuk mengubah pandangan Rakjat terhadap fihak kepolisian, dan saja kira djuga untuk mengubah pandangan seluruh barisan kepolisian terhadap gerakan revolusioner Rakjat, chususnja terhadap kaum Komunis. Mengubah mental seseorang adalah tidak mudah. Begitulah tidak mudah mengubah sikap Rakjat terhadap polisi maupun sikap polisi terhadap Rakjat. Tetapi bukan tidak mungkin. Malahan dapat dikatakan mungkin sekali djika keduaabelah fihak, Rakjat dan Kepolisian, dengan sadar bersama² memperkuat aspek Rakjat daripada kekuasaan politik sekarang dan melawan aspek yang anti-Rakjat, yang anti-Nasakom, yang Komunisto-phobi, yang kolonial. Dalam perdjungan bersama inilah, Rakjat dan Kepolisian yang dulu diper-

tentangkan, akan mendjadi kawan seperdjungan yang akrab.

Pengertian tentang adanya dua aspek daripada kekuasaan politik di Indonesia sekarang ini adalah sangat penting untuk dapat memahami kejadian² yang berlangsung di Indonesia. Mereka yang tidak mengerti atau tidak mau tahu tentang adanya dua aspek daripada kekuasaan politik di Indonesia, jaitu aspek Rakjat dan aspek anti-Rakjat memang mudah mendjadi bingung melihat berbagai peristiwa. Umpamanja disatu fihak pemimpin² dan kader² penting PKI mendapat tempat terhormat di-lembaga² negara ditingkat pusat maupun daerah, tetapi difihak lain harian yang membawa suara PKI, jaitu *Harian Rakjat*, sering di-breidel dan bahkan pernah anggota² Politbiro CC PKI diperbal. Disatu fihak setjara resmi diakui bahwa kaum buruh dan kaum tani adalah kekuatan-kekuatan pokok revolusi Indonesia, pemimpin² buruh dan tani mendapat tempat terhormat di-lembaga² negara ditingkat pusat dan daerah, tetapi difihak lain kaum buruh dan kaum tani sering dibikin susah oleh alat² negara.

WATAK KEKUASAAN YANG BERBEDA MEMBAWA PERBEDAAN DALAM WATAK KEPOLISIAN

Djudul tjeramah malam ini, jaitu *Tempat dan Peranan Polisi Dalam Alam Manipol* adalah sangat tepat, sangat berguna untuk dibahas. Mengapa? Karena dalam djudul ini pada pokoknja

tersirat 2 hal, jaitu : *pertama*, apa dan siapa polisi itu dan *kedua*, apa dan bagaimana tugas dan peranannya dalam masyarakat Indonesia saat ini. Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa dengan memberikan jawaban atas problem² ini, maka akan djelaslah polisi sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek di-tengah² Rakjat Indonesia yang sedang berdjuaug menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945.

Lebih djauh, djudul ini mengungkapkan bahwa fihak Kepolisian setjara sadar menyatakan bahwa polisi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari revolusi dan berkewadajiban mutlak bersama semua golongan revolusioner mendjadi partisipan dalam menjelesaikan tuntutan² revolusi.

Saja berpendapat, bahwa banjak hal berkesudahan dengan kegagalan karena tidak tahu dari mana harus memulai, dan karenanya pula tidak tahu bagaimana mengachirinja. Lain halnja dengan parasaudara, dengan mengemukakan djudul tsb. djelas saudara² bertolak dari pangkalan yang benar. Dengan bertolak dari pangkalan yang benar kita akan dapat menentukan arah serta memperhitungkan segala rintangan yang akan muntjul dan dengan itu dapat pulalah mempersiapkan tindakan² yang akan mengatasi segala rintangan untuk dapat sampai ketudjuan yang telah ditentukan.

Dalam setiap periode sedjarah setelah ada negara, kita mengenal adanya polisi, sebagai alat daripada kekuasaan yang ada pada periode sedjarah tertentu itu. Demikianlah ditanahair kita ini,

kita mengenal polisi pada zaman kekuasaan kolonialis Belanda, pada zaman kekuasaan fasisme Djepang dan kemudian kita mengenal pula polisi Republik Indonesia. Dengan ini saja tidak bermaksud mengatakan bahwa polisi itu dari dulu hingga sekarang sama sadja. Tidak, watak kekuasaan yang berada membawa perbedaan dalam watak kepolisiannya. Sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan, dalam hal inilah persamaannya. Dalam persamaan ini, terdapat pula perbedaan antara satu dengan lainnya. Mengenai ini Presiden Sukarno telah mengatakan setjara tepat : „*Kita ini bekerdja untuk apa, kataku. Dan opgave kita sekarang ini memang lain daripada yang dahulu. Dahulu, waktu zaman Belanda, sebagian daripada kita terang²an sadja bekerdja untuk 'de in stand houding van de koloniale maatschappij'. Dan sesudah 'dat is het verleden', kemudian kita masuk kedalam alam Indonesia merdeka tahun 1945, dan sedjak daripada tahun 1945 itu sebagian daripada kita bisa mengadakan mentale herorientatie, re-orientation daripada mentality kita*”. (Pidato Presiden Sukarno didepan para petugas aparaturnegara, tanggal 27 Djanuari 1961, penerbitan khusus No. 104 Dep. Penerangan R.I. hal. 8).

Dari pendjelasan Presiden Sukarno ini, kita mendapat djawaban bahwa tempat dan peranan polisi adalah sesuai dengan keadaan riil kekuasaan politik yang ada pada suatu masa. Bagaimana dalam keadaan sekarang ? Presiden Sukarno dalam pidatonja tersebut memberikan djawaban

jang tegas : „Jah, saudara adalah pekerdja² untuk Polisi, pekerdja² untuk Kehakiman, pekerdja² untuk Kedjaksaan, pekerdja² untuk Bea dan Tjukai, pekerdja² untuk Imigrasi, tetapi dibalik, dibelakang semua hal itu adalah satu pertanyaan : Pada hakekatnja pekerdja untuk apa ? Dan sebagai saja ulangan beberapa kali, kita sekarang ini, semuanya, sedjak daripada Rakjat, djelata sampai kepada saudara², sampai kepada saja sendiri, adalah pekerdja² untuk membangun masjarakat adil dan makmur, membangun satu Negara Indonesia jang kuat dan terhormat dipandang dunia". (sda hal. 6).

Beladjar dari sedjarah perdjjuangan Rakjat dan bangsa kita sendiri, dapat ditarik peladjaran jang sangat berguna bagi kelandjutan dan kesempurnaan kita semua, didalamnja termasuk polisi dan semua alat² kekuasaan negara lainnja. Saja mengerti apa jang pernah dikatakan oleh Sdr. Menteri/Kepala Kepolisian Negara R. Soekarno Djojonegoro, bahwa „dalam perdjjuangan kita senantiasa terbentur pada pandangan² serta keinginan² jang bertentangan dengan tjita² korps kita sendiri, pandangan² mana sering terdjalin dengan kekuatan² jang riel". (Pidato Hari Kepolisian, 1 Djuli 1961). Disatu fihak memang ada kesimpangsiuran pengaturan Polisi dalam stelsel ketatanegaraan kita, sedangkan difihak lafn, dan ini jang terpenting, adanja pengawasan² jang dikehendaki masjarakat, dikehendaki perdjjuangan Rakjat jang menuntut suatu orde baru, dimana semua alat²

kekuasaan negara dituntut supaja menjesuaikan diri setjara harmonis. Oleh karena itu, selama masih demikian keadaannja, selama masih belum harmonis, pertentangan² tidak mungkin lenjap. Pertentangan itu sendiri adalah sesuatu jang kongkrit ada, sebagai akibat pertentangan antara keinginan subjektif dari atas dengan kenjataan objektif dalam masjarakat.

Kedudukan Kepolisian sebagai aparat dalam struktur ketatanegaraan oleh para sardjana banjak dipersoalkan dari ber-matjam² dasar teori. Dalam ketatanegaraan kita djuga terdjadi silih ganti dalam menempatkan kedudukan Polisi. Hal ini dapat terlihat dari peraturan² dan undang² jang dikeluarkan sedjak 1 Oktober 1945 hingga jang terakhir pada saat ini dengan dikeluarkannja Undang² No. 13/1961, tentang Ketentuan² pokok Kepolisian Negara pada tanggal 19 Djuni 1961.

Dengan tidak meremehkan arti pengorganisasian Kepolisian dalam sistim ketatanegaraan, saja ingin menindjau tempat dan peranan Polisi setjara hakiki dalam keseluruhan masjarakat bangsa dan Rakjat Indonesia.

Pada djudul kuliah umum ini sebenarnja kita telah memasuki langsung pada persoalannja, jaitu tempat dan peranan Polisi dalam alam Manipol. Bahwa Polisi mempunjai tempat dan peranan dalam alam Manipol, pasti ! Jang akan kita djawab adalah dimana dan apa jang harus dikerdjakannja.

Pertama-tama jang harus saja tegaskan, pengertian „dalam alam Manipol". Menurut pengertian

saja, „dalam alam Manipol” berarti dalam alam revolusioner, karena Manipol adalah konsepsi bersama untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Oleh karena itu yang harus saja kuliahkan berdasarkan permintaan PTIK, adalah „tempat dan peranan Polisi dalam alam revolusioner” atau „tempat dan peranan Polisi sebagai potensi penting dalam menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945”.

POLISI DAN RAKJAT HARUS BER-SAMA²
MEMAHAMI SOAL² POKOK REVOLUSI
INDONESIA

Berdasarkan pengertian ini saja berkewajiban untuk lebih dahulu memberikan penjelasan tentang Revolusi Agustus 1945 dan konsepsi untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945, jaitu Manifesto Politik. Dalam penjelasan ini akan kita temukan setjara tepat dimana tempat dan apa peranan Polisi didalamnya.

Sebelum menerangkan soal² pokok revolusi Indonesia menurut Manipol, untuk mentjegah kekatjauan dalam fikiran dan dalam menggunakan sembojan², perlu sekali difahami dengan sedjelas-djelasnja tentang adanya dua tahap revolusi Indonesia. Tentang ini pidato Djarek mengatakan : „ada dua tudjuan dan dua tahap revolusi Indonesia : *Pertama*, tahap mentjapai Indonesia yang merdeka penuh, bersih dari imperialisme — dan yang demokratis — bersih dari sisa² feodalisme. Tahap

ini masih harus diselesaikan dan disempurnakan *Kedua*, tahap mentjapai Indonesia bersosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari l'exploitation de l'homme par l'homme. Tahap ini hanya bisa diselesaikan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnja”. Tegasnja, tugas kita sekarang adalah untuk menyelesaikan tahap pertama dari revolusi Indonesia, jaitu tahap revolusi nasional-demokratis, dengan djalan melaksanakan Manipol setjara konsekwen.

Berbeda dengan revolusi burdjuis Perantjis tahun 1789, Revolusi Indonesia sekarang berhari-depan Sosialisme, sedangkan revolusi Perantjis tersebut tidak mempunyai tudjuan lain ketjuali menaikkan kaum kapitalis Perantjis kesinggasana kekuasaan. Berbeda dengan Revolusi Oktober 1917 di Rusia, yang mempunyai watak (sifat) proletar-sosialis, Revolusi Indonesia sekarang berwatak nasional-demokratis. Mengenai adanya perbedaan² antara revolusi² ini djuga disebut dalam Manipol. Tidak mengerti perbedaan² ini, chususnya tidak mengerti tentang adanya dua tahap Revolusi Indonesia, sama halnya dengan tidak mengerti apa² tentang Revolusi Indonesia.

Untuk lebih djelasnja persoalan² revolusi Indonesia, tiap² orang revolusioner harus mengetahui benar² tentang soal² pokok revolusi Indonesia seperti yang dengan djelas dimuat didalam Manipol.

Dalam Manipol tegas dikatakan, bahwa tugas² Revolusi Indonesia „bukanlah untuk mendirikan

Negara Federal, kekuasaan diktatur atau Republik Kapitalis. Kewajiban² Revolusi Indonesia ialah untuk membentuk satu Republik Kesatuan yang demokratis, dimana Irian Barat juga termasuk didalamnya, dimana Kedaulatan ada ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (UUD 45, fasal 1 ayat 2), dimana hak² azasi dan hak² warganegara didjundjung tinggi, dan membentuk masjarakat adil dan makmur, tjinta-damai dan bersahabat dengan semua negara didunia guna membentuk satu Dunia Baru". (*Tubapi*, hal. 81-82).

Tentang kekuatan² sosial Revolusi Indonesia. Manipol tegas mengatakan: „seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknja tanpa melupakan peranan penting dari golongan² lain, adalah sangat besar dan meyakinkan akan menangnja Revolusi Indonesia". (*Tubapi*, hal. 84).

Tentang sifat (*watak*) Revolusi Indonesia dalam Manipol dikatakan: „Mengingat sifat Revolusi Indonesia yang nasional dan demokratis, maka Revolusi Indonesia adalah Revolusi bersama dari semua klas dan golongan yang menentang imperialisme-kolonialisme. Pendeknja, Revolusi Indonesia harus mendirikan kekuasaan Gotong Rojong, kekuasaan demokratis yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, yang mendjamin terkonsentrasinja seluruh kekuatan Nasional, seluruh kekuatan Rakjat". (*Tubapi*, hal. 85).

Tentang haridepan Revolusi Indonesia, menurut Manipol ialah: „Sosialisme yang disesuaikan de-

ngan kondisi² yang terdapat di Indonesia, dengan alam Indonesia, dengan Rakjat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakjat Indonesia". (*Tubapi*, hal. 85).

Tentang musuh² Revolusi Indonesia dalam Manipol dikatakan: „kaum imperialis Belanda dan kaum imperialis lainnja yang bersikap bermusuhan terhadap Republik serta pembantu² imperialis". (*Tubapi*, hal. 87).

Demikian beberapa patah kata tentang soal² pokok Revolusi Indonesia.

Dari soal² pokok Revolusi Indonesia seperti diuraikan dalam Manipol, djelaslah apa yang harus dikerdjakan oleh Rakjat Indonesia dan oleh aparat² negara yang memihak Rakjat Indonesia.

Kita lihat setjara khusus tentang Kepolisian, untuk mengudji kebenaran yang dikemukakan diatas. Sebagai bahan resmi saja ingin menelaah Undang² No. 13 tahun 1961, tentang ketentuan² pokok Kepolisian Negara. Saja kutip dari pendjelasan tentang Undang² ini, pada bagian umum: „Seperti djuga halnja dengan alat² kekuasaan Negara lainnja, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana untuk menudju tertjapainja masjarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pantjasila atau masjarakat Sosialisme Indonesia guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat".

Selanjutnja mengenai tugas pokok Kepolisian, disebutkan: „Sebagai tugas pokok Kepolisian

Negara dapat disebutkan memelihara keamanan dalam negeri. Penjudikan tindak pidana termasuk pula tugas pokok Kepolisian Negara dalam bidang peradilan. Penjudikan terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tudjuan revolusi mentjapai masjarakat adil dan makmur".

Menurut pendapat saja, inilah djawaban yang tjekak-aos, terhadap masalah yang dikemukakan dalam djudul tjeramah ini. Kepolisian Negara sebagai alat yang revolusioner, bersama seluruh Rakjat harus berdjuaug tak kenal henti untuk melaksanakan semua program revolusi yang tertjantum dalam Manipol, mengalahkan semua musuh² revolusi (penghalang² revolusi), mentjiptakan suatu kekuasaan semua untuk semua, yang akan melahirkan masjarakat adil dan makmur.

SEBAGAI PERSEORANGAN POLISI ADALAH
RAKJAT, SEBAGAI CORPS ADALAH ALAT
NEGARA JANG REVOLUSIONER

Diatas semua ketentuan formil (peraturan² dan undang²), ketentuan² revolusi seperti yang tertjantum dalam Manipol dan pedoman² pelaksanaannya haruslah dijadikan pegangan atau oborpenjuluh bagi fihak Kepolisian dalam mendjalankan tugas² pokoknja. Tetapi kenyataan sekarang ini menundjukkan bahwa Kepolisian kita belum bisa sepenuhnya melakukan peranan sebagai alat revolusioner. Saja kemukakan Bab I tentang ketentuan² umum, fasal 1 menjebut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara dalam mendjalankan tugasnya selalu mendjundjung tinggi hak-hak azasi Rakjat dan hukum Negara.

Rumusan² fasal tersebut merupakan sesuatu yang baik. Sikap Rakjat adalah realistis, jaitu menjokong semua peraturan yang baik dan menuntut pelaksanaannya. Tanpa pelaksanaan yang sesuai dengan perumusan yang baik, benarlah utjapan yang mengatakan bahwa undang² atau peraturan² hanjalah huruf mati yang tertera pada kertas yang membisu.

Kita tjoba memasuki masalahnja setjara kongkrit. Dinjatakan dalam fasal tsb.: Polisi adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Dan selanjutnya mendjundjung tinggi hak-hak azasi Rakjat dan Hukum Negara. Dari sini dapat kita njatakan bahwa dasar tugas Kepolisian Negara adalah : mendjundjung tinggi (1) hak azasi Rakjat dan (2) hukum Negara.

Bila kita peladjar Undang² Dasar 1945 dan Manipol, maka akan ditemukanlah apa yang dirumuskan dalam Amanat Penderitaan Rakjat. Didalam Ampera ini kita menemukan apa yang telah diperdjuaugkan Rakjat untuk mentjapai sesuatu yang terbaik, jaitu masjarakat Indonesia yang Sosial, dimana tidak ada penghisapan atas manusia oleh manusia. Oleh karena itu logika yang paling masuk akal, segala hukum, undang², peraturan

dan apa sadya yang diselenggarakan oleh Negara melalui alat²nja setjara mutlak harus mengabdikan kepada Ampera. Amanat Penderitaan Rakyat itu menuntut adanya jaminan hukum yang adil bagi Rakyat, jaminan kebebasan demokratis, bebas dari kesewenang-wenangan hukum dan praktek kesewenang-wenangan penguasa. Inilah hak azasi Rakyat yang harus didjunjung se-tinggi²nja, dan dimana hukum Negara menjesuaikan diri dengan ini.

Sebagai alat negara, Kepolisian juga harus dibebaskan dari kekangan² yang dapat mendjurkannya menjadi hanya sebagai „alat mati“. Kepolisian harus juga bisa kiprah, harus bisa dengan semangat dan jiwa revolusioner menegakkan hukum, memelihara keamanan dalam negeri, ikut mempersatukan segenap unsur² pendukung revolusi dan dengan tanpa ragu² mengganjang musuh² revolusi, musuh² Rakyat.

Polisi, sebagai perseorangan, adalah Rakyat dan sebagai suatu kesatuan (corps) aparaturnya, haruslah merupakan alat negara yang revolusioner. Tidak ada jalan lain selain berada bersama Rakyat dan untuk Rakyat berjuang melawan musuh² Rakyat, musuh² revolusi, untuk mengalahkannya samasekali. Kemudian bersama Rakyat pula menegakkan suatu kekuasaan yang mampu selanjutnya melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, melahirkan masyarakat adil dan makmur.

PANTJA PROGRAM FN HARUS MENDJIWAI DAN MEMIMPIN KEGIATAN KEPOLISIAN NEGARA

Hanya dengan adanya kekuasaan politik yang sepenuhnya memihak Rakyat, kekuasaan politik yang Gotong Rojong serta bersih dari orang² Nasakom-phobi yang harus diganjang itu, Rakyat dan Polisi bisa kiprah dan tjantjut-taliwondo bersama² melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat. Untuk mentjiptakan keharmonisan ini, maka seluruh Rakyat, termasuk Kepolisian yang memihak Rakyat harus mendjiwai dan mendarahdagingi diri dengan 9 *Wedjangan Presiden*. Mengenai 9 *Wedjangan* yang mahapenting ini, Presiden Sukarno antara lain berkata dalam pidato Takem sbb. :

„Sedjak tahun 1959 itu, maka boleh dikatakan tiap pidato 17 Agustus, dari halaman pertama sampai kehalaman terakhir, mengandung *wedjangan*. *Wedjangan* mengenai Revolusi; *wedjangan* mengenai Pantja Sila dan progresivisme; *wedjangan* tentang kepribadian Indonesia yang berpusat kepada gotong-rojong, musjawarah dan mufakat; *wedjangan* tentang persatuan Nasional Revolusioner; *wedjangan* membantras komunisto-phobi; *wedjangan* mutlak-perlunja poros Nasakom; *wedjangan* mengenai djahatnja liberalisme; *wedjangan* mengenai perlunja Satu Pimpinan Nasional; *wedjangan* mengenai sosialisme, sosialisme, sosialisme dan sekali lagi sosialisme. Hanya djika landasan² ini menjadi milik-bersama daripada Rakyat, milik-bersama daripada para pemimpin, milik-bersama pun daripada seluruh Angkatan

Bersendjata, maka dapatlah ditjapai hasil² gemilang dalam Revolusi Indonesia, hasil gemilang pula dalam pelaksanaan Triprogram".

PKI dengan sedar mendukung landasan² ini, karena sepenuhnya sesuai dengan pemaduan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia, dengan keharusan kami „meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme", dalam arti mentrapkan kebenaran universal Marxisme-Leninisme dengan bertitiktolak dari kenja-taan objektif masyarakat Indonesia serta kepentingan-kepentingan revolusi dan Rakjat Indonesia.

Sebagaimana sudah diketahui, 9 Wedjangan Presiden juga termasuk dalam Pantja Program Front Nasional yang baru² ini dikomandokan oleh Presiden Sukarno untuk dilaksanakan. Lengkapnya Pantja Program tsb. adalah sbb. :

1. Mengkonsolidasi kemenangan yang sudah ditjapai, jaitu dibidang perdjjuangan Irian Barat, Keamanan dan di-bidang² lain.
2. Menanggulangi kesulitan ekonomi dengan mengutamakan kenaikan produksi.
3. Meneruskan perdjjuangan anti-imperialisme dan neo-kolonialisme dengan memperkuat kegotongrojongan nasional revolusioner berporoskan NASAKOM.
4. Meratakan dan mengamalkan indoktrinasi 7 bahan pokok indoktrinasi dilengkapi dengan Resopim dan Takem yang memuat „9 Wedjangan" Presiden.

5. Melaksanakan rituling aparatatur negara termasuk bidang pemerintahan dari pusat sampai ke-daerah².

Karena Pantja Program FN ini sudah dikomandokan untuk dilaksanakan oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Tertinggi Front Nasional, maka segenap aparat negara dan seluruh Rakjat Indonesia harus melaksanakannya. Pantja Program ini harus mendjiwai dan memimpin kegiatan² Rakjat Indonesia, termasuk Kepolisian Negara dan aparat² Negara lainnya, dalam rangka melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat.

(Pokok² tjeramah dihadapan para mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Djakarta, 22 Februari 1963 malam).

PARTAI² REVOLUSIONER ADALAH ALAT REVOLUSI SEDJAK SEBELUM REVOLUSI

Partai² politik revolusioner adalah djuga alat revolusi. Tapi ada bedanja dengan alat² revolusi lainnja. Partai² sudah mendjadi alat revolusi sedjak sebelum revolusi nasional kita petjah dalam bulan Agustus 1945. Alat² revolusi jang kita miliki sekarang misalnja Angkatan Bersendjata, badan-badan eksekutif, lembaga² legislatif, dll., lahir sesudah revolusi.

Partai² revolusioner sedjak zaman djadjahan sudah mendjadi pendidik dan pembimbing kesedaran politik Rakjat, penanam kesedaran berorganisasi dan kesedaran berdisiplin dikalangan Rakjat, dan penanam kesedaran tentang kesatuan bangsa. Semuanja ini merupakan persiapan untuk mendirikan satu negara nasional jang merdeka. Sampai sekarang tugas² ini masih harus dikerdjakan, dan dikerdjakan dengan baik, oleh partai² revolusioner, sudah tentu dengan tudjuan jang lebih luas seperti jang dimuat dalam Manipol. Dengan sendirinja, PKI djuga harus melaksanakan tugas² ini.

Ada orang jang tidak mengerti, mengapa sulit betul membubarkan partai² revolusioner di Indonesia. Saja berpendapat, bahwa partai² revolusioner tidak dapat dibubarkan, atau mereka jang

membubarkannja harus berhadapan dengan Rakjat banjak. Partai² revolusioner sangat erat hubungannja dengan massa Rakjat.

Selandjutnja perlu saja njatakan, bahwa rituling jang sudah dilakukan terhadap partai², adalah model untuk rituling di-bidang² lain. Tidak ada bidang lain jang sudah dirituling begitu radikal seperti bidang kepartaian. Saja serukan, supaya mereka jang partai-phobi lebih banjak memikirkan dan berbuat sesuatu dengan mengadakan rituling dibidangnja masing², daripada me-rongrong² kehidupan kepartaian.

MALAYSIA ADALAH KONSPIRASI KONTRA-REVOLUSIONER INTERNASIONAL, PENERUS PRRI-PERMESTA

Diantara pertanjaan² jang Sdr.² adjukan ada jang mengenai Malaysia. Mengenai ini, kita djangan hanja melihat Tengku Abdul Rachman, jang tidak lebih daripada "play boy" itu. Malaysia tidak lain adalah konspirasi kontra-revolusioner internasional, penerus PRRI-Permesta. Pendukung² Malaysia adalah sama dengan pendukung² pemberontakan PRRI-Permesta, jaitu terutama kaum imperialis Inggris dan Amerika Serikat. Oleh karena itu pulalah, sudah sedjak semula Rakjat Indonesia bangkit serentak menentang Malaysia, karena mereka melihat musuh² mereka jang lama kembali naik panggung. Bedanja, dulu diwilajah Indonesia sekarang diluar. Persamaannja, djuga Malaysia akan mengalami nasib seperti kaum pemberontak PRRI-Permesta.

OMONGKOSONG PENGHIDUPAN RAKJAT MALAJA LEBIH BAIK DARI RAKJAT INDONESIA

Ada orang, jang pertjaja pada bualan Tengku dan mengira bahwa Rakjat Malaja penghidupannya lebih baik dari Rakjat Indonesia. Padahal tidak lain daripada sardjana Malaja sendiri jang membantah bualan Tengku itu. Sardjana tersebut ialah Profesor Azis jang kabarnya sekarang dimusuhi oleh Tengku.

Kaum buruh dan petani Indonesia penghidupannya sekarang memang masih susah, tetapi kaum buruh dan petani Malaja lebih susah lagi. Bedanya, di Malaja belum luas gerakan menuntut perbaikan taraf hidup, Rakjat pekerdja disana sangat tertekan, djadi tidak begitu kedengaran oleh orang luar tentang keluh-kesah kaum buruh dan petani Malaja, seperti halnya ketika Indonesia masih didjajah Belanda dulu. Perbedaan lain lagi ialah, bahwa Rakjat Indonesia jang sudah pernah mengalami revolusi mengenal betul² akan harga dirinya dan oleh karena itu mempunyai tuntutan² hidup jang sudah agak tinggi. "National income" per capita tidak dapat didjadikan ukuran tentang penghidupan Rakjat, karena dalam kenjataannya bagian jang sangat besar dari "national income" dimiliki oleh sebagian ketjil kaum penghisap, sedangkan bagian jang sangat terbesar dari Rakjat hidup dari sebagian ketjil dari "national income".

(Petikan tjeramah di Sekolah Kepolisian Sukabumi, 6 Maret 1963, Djudul tjeramah: Fungsi Partai dalam penyelesaian revolusi).

Untuk lebih mendalami soal² jang diadjukan didalam tjeramah² ini, buku² D.N. Aalit berikut ini akan sangat membantu :

* Pilihan Tulisan djilid I	(habis)
* Pilihan Tulisan djilid II	Rp. 100,—
* Pilihan Tulisan djilid III	(akan terbit)
* Untuk Demokrasi, Persatuan dan Mobilisasi	Rp. 20,—
* Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia	„ 35,—
* Pengantar Etika dan Moral Komunis	„ 50,—
* Sosialisme Indonesia dan sjarat pelaksanaannya	(habis)
* DEKON dan sjarat ² pelaksanaannya (akan terbit)	
* Tentang Marxisme	Rp. 150,—
* Berani, berani, sekali lagi berani ...	„ 75,—
* Setudju Manipol harus setudju Nasakom ¹	„ 17,50
..... si dan kabinet gotong-	
..... e dan Front Nasional	„ 6,—
..... san „Pembaruan“, kotakpos 2522	„ 22,50
JAKARTA	

37

Rp. 20,—

P.I.R. A. 175/63 — 10 000